

STRATEGI POLITIK HIZBUT TAHRIR DALAM MENGINTERNASIONALISASIKAN GAGASAN PENEGAKAN KEMBALI KHILAFAH ISLAMIYAH

(MENGUNAKAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME)

NYS Junita Arliani

Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
nys_junita@yahoo.com/nyimasnita@gmail.com

Abstrak-Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam revolusioner yang memiliki prinsip untuk mendirikan dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Daulah khilafah Islamiyah menjadi harga mati dalam kehidupan dunia yang sejahtera. Berbagai strategi dilakukan Hizb untuk menyatukan umat Muslim yang ada di dunia dan mengenalkan *khilafah* dalam skala Internasional. Sejak runtuhnya *khilafah*, kepercayaan diri umat Muslim melemah dan sistem dunia diambil alih oleh peradaban barat. Dengan ini, tujuan dari penulisan ini untuk menganalisa strategi politik Hizb dalam mempromosikan sistem Islam di mata dunia sehingga peradaban Islam mampu menguasai dunia. dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber utama yang digunakan yakni data primer (wawancara) dan sekunder (studi pustaka). Dengan ini para pembaca mampu melihat kapasitas dan relevansi gerakan Hizbut Tahrir dalam melancarkan idenya untuk menegakkan kembali Daulah Khilafah Islamiyah di level Internasional.

Kata Kunci-Hizbut Tahrir, partai, revolusioner, khilafah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah runtuhnya Islam telah mengantar kita ke kehidupan yang penuh dengan kebebasan yang jauh dengan aturan agama. Apalagi dampak perjanjian Westphalia 1648 yang mengakhiri *Perang Tiga Puluh Tahun* antara Katholik dan Kristen Protestan memunculkan paham kemerdekaan dan kebebasan tanpa batas yakni sekulerisme. Pengaruh paham sekulerisme yang menyulut, menjadi sumber inspirasi bagi berbagai kawasan pemikiran dan berkembang biak ke segala lini pemikiran kaum intelektual sejak dahulu hingga kini. Paham ini dijadikan tata cara hidup yang mengedepankan tujuan dan sikap dalam batas dunia [2]. Mengedepankan duniawi dan memisahkan peran agama dalam kehidupan merupakan esensi dari paham ini. Segala bidang kehidupan baik ekonomi, politik, hukum

pendidikan, sosial ditentukan oleh kepentingan kebendaan manusia.

Kemunculan sekulerisme yang masuk ke tata dunia sudah menjadi pembicaraan hebat. Bahkan gelombang penyebarannya telah menggugul keyakinan dan keimanan umat Islam dalam pemikiran dan perbuatan. Hingga standar sejahtera yang dibanggakan adalah dilihat dari penampakan materiil yang maju, kemunculan pemikiran yang bebas dan gaya hidup kekinian (modern). Manusia dapat bertindak sesuai dengan keinginannya. Hingga konsep adil dilihat dari kesamarataan dan tidak berat sebelah bahkan hal ini dapat disesuaikan dengan haknya dilihat dari seberapa besar yang dikeluarkan. Alhasil, mulai abad ke 18 musibah intelektual, kultural, ekonomi, sosial dan pendidikan dialami oleh umat Islam.

Sejak runtuhnya kerajaan Islam pada abad ke-18, kondisi peradaban dunia dibawah pengaruh modernis. Pada zaman ini, dunia Islam berada pada bayang-bayang Barat. Inilah ide Barat untuk menghancurkan panji Islam. Kaum Muslim mengalami stagnasi dalam pemikiran dan disintegrasi politik dalam menyebarkan *diinullah* (agama Allah). Pengaruh modernis dan imperialis Barat terlihat sekali dalam bidang pendidikan. Penulis mengutip tesisnya *Siti Muslikhati* (dosen HI UMY, tahun 2010)berisi mengenai:

“Adapun golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah misionaris sebelum adanya kependudukan dan di seluruh sekolah setelah pendudukan, telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan *tsaqafah* (kebudayaan) berdasar filsafat, *hadharah* (peradaban) dan pemahaman kehidupan mereka yang khas. Kemudian tokoh-tokoh Barat dijadikan sumber *tsaqafah* sebagaimana sejarah dan kebangkitan Barat dijadikan sumber asal bagi apa yang mengisi pemikiran kita.”

Presiden Institut Studi Strategis Alexander Konovalov menerangkan, sebelumnya tata dunia baru yang membentuk peraturan permainan dan tanduk kekuatan dunia adalah hasil dari perang besar. Tetapi, tatanan baru yang dihasilkan dari perang besar tersebut masih jauh dari peran agama di dalamnya.

Konflik dan permasalahan tetap terjadi pada tatanan dunia saat ini dan mendesak akan butuhnya sebuah sistem tatanan baru yang melibatkan agama tapi tidak dengan jalan perang. Maka, negara butuh kelompok (jamaah) yang menginginkan pembaharuan untuk mewujudkan sistem tatanan yang baru yang tidak lepas dari keterikatan hukum mutlak (Tuhan).

Tiba pada abad ke-19 keadaan pun mulai berubah Dunia Islam perlahan bangkit untuk melawan pengaruh dan tekanan Barat. Semenjak kemunduran umat pada abad pertengahan, dunia mulai bangkit dari keterpurukan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai pembaru dan pembaharuan Islam demi kemajuan dunia Islam. Munculnya gerakan pembaharuan ini, dikarenakan timbulnya kesadaran para ulama terhadap tsaqafah asing yang masuk dan dipolitisasi sebagai ajaran Islam.

Gerakan pembaharu ini merupakan aksi reaksi umat Islam untuk bangkit dan membersihkan Islam dari ajaran yang menyimpang atau tsaqafah asing. Hal lainnya adalah hegemoni dunia barat dalam sektor penting negara seperti politik, ekonomi, perdagangan, dan lainnya. Pengaruh dan otoritas dunia barat terhadap dunia memperlihatkan keterbelakangan umat Islam. Apalagi, umat Islam atau negara yang mayoritas berpenduduk Muslim mencontoh peradaban Barat bagi peradaban bangsa. Hal ini merupakan bentuk agar negara tidak tertinggal dengan modernisme dan dikatakan mampu mengimbangi kekuatan bangsa Barat.

Maka dari itu, sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

“(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”

Kandungan ayat diatas menyiratkan bahwa ada seruan yang jelas bagi umat Muslim untuk membentuk sebuah gerakan ataupun jamaah baik itu partai atau gerakan lainnya yang aktivitasnya terbatas dalam dua kegiatan yaitu: pertama, berda’wah pada Islam kedua, *melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar* di tengah-tengah kaum Muslimin. Keberadaan jama’ah atau kelompok da’wah apalagi ditengah umat Islam yang sedang mengalami krisis iman merupakan kewajiban bersama (*fardhu kifayah*) yang artinya dibebankan pada seluruh umat muslim yang ada dimuka bumi ini. Kesimpulannya, urgensi dibentuknya sebuah kelompok atau jamaah bukan hanya sebagai *thalab (tuntutan)* tapi juga *qarinah* (indikator) yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu keniscayaan. Kelompok yang dimaksud harus memiliki dua tugas: (1) mengajak pada al-Khayr, yakni mengajak pada al-Islâm; (2) memerintahkan kebajikan (melaksanakan syariat) dan mencegah kemungkaran (mencegah pelanggaran terhadap syariat).

Misi utama Islam adalah membangkitkan gerakan perubahan sosial dan meluruskan pola pikir umat

manusia dengan acuan pandangan tauhid. Tentunya dalam membuat sebuah gerakan (harakah) yang berdasar dengan ajaran tauhid perlu memenuhi berbagai syarat. Menurut Abdurrahman Muhammad Walid, tiga aspek yang harus dipenuhi bagi sebuah gerakan adalah; mempunyai target dan tujuan yang diusahakan dan hendak dicapai, mempunyai bentuk pemikiran yang telah ditentukan oleh gerakan (harakah) dalam aktivitas perjuangannya, mempunyai arah dan kecenderungan tertentu pada orang-orang yang bergabung dalam harakah dan anggotanya berasal dari kalangan Muslim. Jadi, untuk menentukan identitas gerakan (harakah) agar dapat dikategorikan sebagai gerakan Islam semestinya memenuhi persyaratan diatas.

Al-Qur'an merupakan sumber acuan utama dalam bertindak, termasuk perkara sistem bagi negara. Negara harus mempunyai prinsip utama yang berasal dari hal yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat bahkan diubah. Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* (yang merupakan rahmat bagi seluruh alam). Jadi tidak hanya umat Islam, tapi bagi semua makhluk yang ada dimuka bumi ini tanpa ada yang merasa terdiskriminasi atau tidak mendapatkan haknya. Semua hal terbagi menjadi rata sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga sumber yang digunakanpun juga satu yaitu Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat.

Istilah khilafah dalam terminologi politik Islam, mulai hadir saat Islam perlu melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW setelah sepeninggalan beliau. Khilafah Islamiyah menurut sejarah telah mampu menguasai dunia hingga 1300 tahun lamanya. Khilafah menjadi sandaran, penjaga dan pelindung kaum Muslimin dan menjadi pilar utama sistem hukum Islam ditegakkan. Dilihat dari masa kekhalifahan Usman, pada masa ini kegemilangan dan keemasan (puncak peradaban) pun diraih oleh kaum Muslim sejak wafatnya Rasulullah. Hingga tiba Mustafa Kemal Attaturk merenggut kebahagiaan tersebut dari umat Muslim. Seorang pengkhianat dari Yahudi tersebut telah meluluhlantakan Khilafah dengan menggantinya dengan sistem sekuler.

Tapi, kaum Muslimin tidak akan berdiam diri dan bertekad untuk menjemput janji Illahi yakni:

“Ditengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu ia akan mengangkatnya jika ia berkehendak mengangkatnya. Kemudian ada khilafah dengan manhaj kenabian, ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu ia akan mengangkatnya jika ia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan yang dzalim), ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu ia akan mengangkatnya jika ia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan diktator) yang akan menyengsarakan, ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Selanjutnya akan ada yang mengikuti manhaj kenabian. Lalu beliau kemudian diam.”

A. Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang diterangkan diatas, penulis ingin membahas mengenai “*bagaimana strategi politik Hizbut Tahrir dalam menginternasionalisasikan gagasan penegakan kembali sistem Khilafah Islamiyah dimata dunia?*”

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran Hizbut Tahrir dalam memetakan konsep khilafah pada konstelasi internasional
2. Untuk menganalisa metode pergerakan Hizb dalam menarik perhatian publik
3. Untuk mengetahui fase perubahan sosial dan perkembangan Hizb dalam skala Internasional
4. Untuk mengetahui dan menganalisa strategi Hizb dalam menginternasionalisasikan ide penegakan kembali khilafah Islamiyah

C. Kajian Pustaka

Dalam bukunya **Syuro bukan Demokrasi, Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawi** mengklarifikasi berbagai penelitian dan pemahaman terhadap konsep *syuro* yang menyimpulkan bahwa konsep tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Dan dalam tesis ini beliau menjelaskan bahwa demokrasi mengambil nilai-nilai *syuro* dan demokrasi merupakan manifestasi *syuro* versi Eropa. Buku ini juga hadir karena melihat fenomena kepalsuan pemikiran mengenai *syuro* yang menyamakannya dengan demokrasi. Dengan ini Asy-Syawi membagi tentang *syuro* sebagai teori universal dalam syariat Islam agar dapat menyempurnakan konsep *Khilafah* yang diutarakan *As-Sanhuri* dalam kitabnya.

Asy-Syawi menyinggung mengenai khilafah dan ciri penting dalam khilafah menurut *As-Sanhuri* ialah prinsip kesatuan umat. Mereka berpendapat bahwa persatuan itu tidak mungkin terpisah dari kemerdekaan. Sementara *konsep syuro* adalah kemerdekaan dalam wujud islami. Maksudnya, kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat serta benteng bagi hak-hak pribadi, jamaah dan bangsa dimana sistem Islam harus tegak diatasnya. Dalam hal ini *syuro* dijadikan mabda kehidupan dan posisinya lebih tinggi dari pada negara. Karena *syuro* yang ditentukan oleh syariat bersifat ketuhanan dan kekuasaannya diatas wewenang pemerintah dan para penguasa. Singkatnya, *syuro* dijadikan sebagai benteng yang dibawahnya berlindung kaidah-kaidah pemerintahan Islam dan *Imamah* (kepemimpinan umum). Dengan kata lain, *syuro* masuk dalam kaidah sosial yang sifatnya tidak terbatas dalam kerangka sistem pemerintahan Islam semata, tidak juga terbatas pada mabda-mabda yang mengikat para penguasa dan yang mengatur tanggung jawab mereka. Mengamati dari pembahasan yang tertera didalam buku ini, penulis meletakkan posisi *syuro* sebagai konsepsi Islam bagi sebuah negara yang mengatur tentang kesetiakawanan, kerjasama dan pengaturan berbagai urusan masyarakat.

Menurut **Dr. Sidik Jatmika** dalam bukunya yang berjudul **Hubungan Internasional di Kawasan Timur Tengah**, salah satu babnya menjelaskan urgensi berdirinya ide Khilafah Islamiyah bagi Hizbut Tahrir. Keinginan Hizbut Tahrir dalam menghadirkan kembali sistem Khilafah menjadi sistem di muka bumi ini bukan tanpa alasan. Disini terlihat beliau menulis bahwa ada beberapa alasan Hizbut Tahrir berdiri dan mempunyai misi dalam membangkitkan kembali Khilafah Islamiyah.

Pertama, keharusan berdirinya Partai-partai politik menurut syariat. Didalam surat Ali-Imron ayat 104, “*hendaklah diantara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran*”. Urgensi ayat tersebut yang menjadi berdirinya Hizbut Tahrir ketengah masyarakat sebagai bentuk dari implementasi dan perwujudan dari kepatuhan terhadap perintah Allah. Perintah ini tidak hanya menunjukkan tuntutan tapi juga adanya sebuah keniscayaan kalau kelompok yang berorganisasi adalah kelompok yang harus mendakwahkan diri dalam menyerukan kebaikan dan menumpas kemungkaran. Penulis menyimpulkan bahwa jamaah yang dimaksud adalah haruslah berbentuk partai politik yang merupakan elemen politik. Tentu, partai politik tersebut memiliki kewajiban untuk mengoreksi kerja pemerintahan terhadap kebijakan (wajibnya pelaksanaan syariat islam) dalam negara. Hal yang perlu ditekankan adalah partai politik tersebut harus berasaskan islam baik dari segi pemikiran dan metodenya.

Kedua, keadaan sosial kemasyarakatan yang jauh dari ide-ide Islam. Hal ini yang membangkitkan Hizbut Tahrir untuk mengemban dakwah Islam dan mentransformasi keadaan sosial yang rusak menjadi masyarakat islam. Dengan upaya-upaya seperti mengubah ide-ide saat ini menjadi ide islam. Sehingga kegiatan ini dapat mengubah cara berpikir umat dan mendorong mereka dalam mengaplikasikan kehidupan dengan tuntunan Islam. Selain itu juga mengubah perasaan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat menjadi perasaan islam. Alhasil, masyarakat dapat mengedepankan segala sesuatunya hanya untuk mengharap ridho Allah dan akan benci terhadap hal-hal yang sangat dimurkai Allah. Terakhir, mengubah tata pergaulan atau interaksi masyarakat saat ini menjadi interaksi yang islami (sesuai dengan hukum Islam).

Ketiga, adanya imperialisme orang-orang kafir (kufur atau tidak menerapkan sistem islam). Hizbut Tahrir berjuang untuk melepaskan umat Islam dari belenggu kekuasaan mereka, membebaskan umat Islam dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akar pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam. Alasan-alasan tersebut yang membangkitkan Hizbut Tahrir dalam mengembalikan sistem Khilafah dimuka bumi. Upayanya yang bersifat politis, aqidah Islam yang diemban tidak membatasi ruang gerak hanya dalam satu aspek saja tetapi seluruh aspek kehidupan.

Menurut **Zulfadli** dalam tesisnya yang berjudul **Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta**

menggambarkan perilaku pergerakan Hizbut Tahrir sebagai organisasi Islam ideologis dalam mewujudkan penerapan syari'at Islam dan mewujudkan penegakan kembali khilafah. Disini dijelaskan bahwa cara Hizbut Tahrir melebur dalam kehidupan masyarakat dengan berorientasi pada aspek ideologis dan politis yang terkait dengan konsep *habitus*, arena perjuangan dan kekuasaan simbolik. Pertama, *habitus* dikonstruksi sebagai sebuah struktur mental yang diinternalisasikan melalui individu atau perorangan untuk memobilisasi tindakan guna memahami realitas sosial masyarakat. Kedua, *arena perjuangan* dikonstruksikan sebagai upaya mencari dan memperkuat jejaring antar berbagai posisi objektif yang dekat dengan hirarki kekuasaan untuk mendapatkan kedudukan sosial. Sedangkan *kekuasaan simbolik* sangat terkait dengan dominasi kekuasaan yang bersifat memaksa dan hal ini berlaku atau diakuinya suatu sistem dan perangkat ideologi (Islam) kepada pihak lain yang didominasi.

Menurut **Abul A'la Al-Maududi** dalam bukunya yang berjudul *Khilafah dan Kerajaan*, disebutkan bahwa khilafah yang baik dan benar itu adalah sistem sejak meninggalnya Rasulullah[30]. Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Rasulullah menerapkan sistem *al-khilafah ar-rasyidah* yang merupakan lanjutan atau pengganti kepemimpinan dalam pemerintahan sejak beliau wafat. Al-Maududi melihat dari proses penunjukan seorang khalifah (pengganti) Rasulullah. Islam menuntut adanya kekhalifahan yang didasarkan atas musyawarah, maka tidak satu keluargapun memonopoli pemerintahan, tidak seorang pun merampas kekuasaan dengan kekuatan ataupun dengan paksaan dan tidak seorang pun mencoba untuk memuji dirinya atau memaksakan pribadinya guna mencapai kedudukan khalifah. Jadi hal ini dapat dikatakan bahwa tidak adanya khilafah tanpa proses musyawarah dan baiat dari masyarakat. Al-Maududi mengutip dari *thaqabat ibnu Sa'd, jilid 4 halaman 113*, jika kepemimpinan yang benar adalah yang berdasarkan musyawarah. Adapun kerajaan adalah yang dimenangkan dengan kekuatan pedang. Jadi beliau menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Rasulullah saw memandang khilafah sebagai suatu jabatan yang dipilih dan harus diputuskan berdasarkan kerelaan kaum muslimin dan hasil musyawarah antara mereka. Dari penjelasan diatas memperlihatkan analisis dan evaluasi yang berani dalam kurun sejarah pemerintahan Islam.

Mengamati penguraian dari berbagai penelitian baik dalam bentuk jurnal, tesis maupun buku, penulis memandang bahwa penelitian yang pernah ada sepanjang waktu mengenai khilafah dan partai politik hanya ditinjau dari segi urgensi dan kebutuhan umat sejak meninggalnya Rasulullah serta sedikit uraian umum mengenai *uslub*(cara) realisasinya. Hal ini yang menjadi *concern* penulis untuk meneliti lebih lanjut sikap sebuah partai politik terhadap urgensi tersebut dan bagaimana strategi yang terbaik untuk mewujudkan kembali Khilafah menjadi sistem kepemimpinan dunia. Kali ini

penulis berusaha untuk menjelaskan strategi politik Hizbut Tahrir sebagai partai politik untuk mewujudkan ide menegakkan kembali Khilafah Islamiyah ke skala internasional. Mengingat bahwa kebutuhan umat akan kehidupan yang sejahtera dan saat ini dirasakan keadilan berada diujung tanduk. Perlu adanya khilafah kembali di tengah umat. Maka dari itu, untuk membedakan dan menambah penelitian yang ada sebelumnya, penulis akan mengkaji **strategi Hizbut Tahrir sebagai partai politik dalam menginternasionalisasikan ide penegakan kembali khilafah Islamiyah** dengan menggunakan pendekatan sosial yakni konstruktivisme.

D. Kerangka Teoritik

Pendekatan Konstruktivisme

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif (pendekatan) konstruktivisme. Dalam studi sosial, konstruktivis menganalisa fenomena berdasarkan atau berfokus pada ide/ gagasan. Konstruktivis memberikan perhatian kajiannya pada persoalan-persoalan bagaimana ide dan identitas dibentuk, bagaimana ide dan identitas tersebut berkembang dan bagaimana ide dan identitas membentuk pemahaman negara dan merespon kondisi di sekitarnya. Konstruktivisme hadir untuk menengahi perdebatan besar antara realisme dan liberalisme. Kedua teori menyatakan bahwa sistem anarki akan membentuk perilaku negara. Neorealis beranggapan bahwa sistem anarki akan membawa negara pada konflik begitu dengan neoliberalism, anarki dalam hubungan internasional justru mampu memimpin dunia mengarah pada korporasi internasional.

Didalam bukunya Alexander Wendth, tahun 1999 menjelaskan kontribusi konstruktivisme dikategorikan dalam tiga aspek yakni metodologi, ontologi dan empirisme. Pada **aspek metodologi**, konstruktivisme fokus terhadap lima hal yaitu mempertanyakan secara kritis **dari mana** datangnya **identitas dan kepentingan** seorang aktor, **identitas** dan **kepentingan** bukan realitas melainkan **bentukan struktur dan teori**, menekankan **pentingnya kekuatan ide**, menjadikan **kekuatan ide sangat berperan penting dalam kehidupan sosial** dalam menentukan pilihan di antara pertimbangan dari adanya keberagaman sosial, dan **institusi merupakan struktur sosial** yang berfungsi untuk **"sharing gagasan"**. Sedangkan dalam **aspek ontologi**, konstruktivisme fokus pada tiga hal yaitu **struktur dan intersubjektivitas** antarnegara dalam berinteraksi, tindakan **memproduksi dan mereproduksi konsepsi identitas** dalam ruang sosial dan waktu tertentu, serta **negara** mentransformasikan kultur hubungan internasional dalam konteks **sistem keamanan kolektif** (*a collective security system*). Kemudian dalam **aspek empirisme**, konstruktivisme fokus terhadap 2 hal yakni **identitas dan kepentingan negara** dikonstruksikan oleh **sistem struktur dan kepentingan** serta identitas negara selalu dikonstruksikan dalam **sistem hubungan internasional**.

Ungkap Wendth, kepentingan negara akan dibentuk dari unsur budaya yang itu hanya kita dapat dari kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menjadi patokan akan tercapainya perubahan struktural dan mempengaruhi bagaimana negara tersebut bertindak. Dengan kata lain, lingkungan sosial akan sangat mempengaruhi identitas sebuah aktor (yang dalam realitas mengatakan bahwa fokus utama adalah negara). Kepentingan sebuah negara dilihat dari tingkah laku atau aksi yang terjadi di internal (lingkungan masyarakat) negara. Hal inilah yang akan menentukan kebijakan sebuah negara. Singkat kata, realitas sosial adalah hasil dari konstruksi manusia. norma yang berlaku dalam sebuah negara akan mempengaruhi aksi negara.

Budaya dalam KBBI adalah hasil cipta dan karya manusia yang bersifat keindahan peradaban. Dari budaya kita dapat menemukan konsepsi negara. Wendth menyatakan “*shared ideas* membentuk kepentingan dan kemampuan negara”. *Collective meaning* atau *shared ideas* memberikan pengaruh pada perilaku negara dalam proses saling mempengaruhi [36]. Ini juga menjadi dasar terbentuknya intersubjetivitas dan kemudian membentuk struktur dan pada akhirnya mengatur tindakan negara. Tidak hanya itu, konstruktivis menegaskan bahwa *distribution of knowledge* akan menentukan atau membentuk konsepsi negara tentang *self and others*.

Mengutip dari penjabaran yang tertera disalah satu tesis Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, ia mengambil pernyataan dari Robert Jackson dan George Serensen didalam bukunya yang berjudul *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (terjemahan) menyatakan:

“Para kaum konstruktivisme dalam hubungan internasional pada dasarnya mengasumsikan bahwa politik internasional adalah hasil dari suatu konstruksi sosial yang berarti proses dialektika antara “struktur (sistem negara)” dan “agen (aktor/grup)”.Maksudnya, lingkungan sosial dan politik serta manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan sosial-politik. Menurut Giddens, hubungan antara struktur dan agen adalah *struktur* dikatakan sebagai (aturan dan kondisi yang memandu tindakan sosial) tidak menentukan apa yang dilakukan *agen* secara mekanis. Hubungan ini melibatkan pemahaman dan makna *intersubjektif* [38]. Struktur dapat membatasi para agen tetapi agen juga dapat mentransformasi struktur dengan mempertimbangkannya dan mengacu padanya yang menghasilkan cara baru.”

Telah dijelaskan diatas bahwa adanya keterkaitan antara *struktur* dan *agen*. Hadirnya agen atau kelompok kemasyarakatan sangat membantu bahkan bisa mempengaruhi tatanan negara. Tetapi, hal ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya karna sifatnya yang terbatas. Penulis melihat *struktur* sebagai sistem atau aturan ketatanegaraan yang secara tidak langsung menembus dan mengatur kehidupan sosial. Artinya perlu adanya mekanisme khusus atau sebuah kelompok

yang dekat dengan masyarakat untuk mengetahui kehidupan sosial secara langsung. Dengan kata lain, diperlukan tangan atau instrumen yang dapat menaungi kehidupan sosial.

Pernyataan George diatas juga dipertegas oleh Mely C Anthony yang menyatakan:

“Constructivisme, especially allows us to identify non state actor as the “agents” who bring with their “ideas” that are critical in shaping state policies. Constructivism also alerts us to perceptible changes in attitudes and approaches within and among states that may be taking place as ideas find their way into concrete policies. These ideas add to the dynamics as the state actors and to a certain extent, non state actors engage in the process that bring about intersubjective understanding of how inter-state relations should be.”

Menurut Wendt tahun 1992, *Struktur sosial* mempunyai tiga *elemen*: pengetahuan bersama, sumber daya material, dan praktik. Struktur sosial didefinisikan sebagian, oleh pemahaman bersama, ekspektasi atau pengetahuan. Hal tersebut membenarkan para aktor dalam situasi dan sifat alamiah hubungan, apakah bersifat kooperatif (liberalis) atau konfliktual (realis). Alexander Wendth menyatakan bahwa struktur immaterial sangat penting, karena dengan melalui ide mereka kita dapat menemui makna sosial. Dan sebuah interaksi hubungan internasional dapat dikatakan ideal jika didasari pada *teori state centric structural*.

Wendth mengatakan ini karena lebih menekankan pada *collective meaning* yang artinya kepentingan bersama dari negara-negara lebih besar urgensinya untuk dihadapi dan dicapai. Hal ini mengungkapkan bahwa teori konstruktivisme menolak kepentingan individu yang secara tidak langsung mengkritik teori neorealisme. Karena neorealisme menekankan pada elemen power materi sedang konstruktivisme lebih menekankan pada norma dan ide. Dengan inilah identitas sosial aktor akan terbentuk dan identitas sosiallah yang akan membentuk kepentingan melalui komunikasi dan imajinasi. Dengan kata lain bahwa norma yang berlaku dalam skala internasional akan membentuk perilaku negara sebagai identitas berdaulat.

Dari penjelasan diatas, penulis menjadikan Hizbut Tahrir disini bertindak sebagai aktor politik (agen atau kelompok yang ada di masyarakat) yang dalam hal ini berdiri atas maksud memperbaiki struktur sosial yang ada didalam tatanan sebuah negara. Penulis menyimpulkan bahwa Hizb memiliki ide menegakkan kembali *khilafah* sebagai sistem kepemimpinan umum yang dijadikan sebagai sistem dunia. Ide tersebut terbentuk atas dasar pemaknaan fakta. Maksudnya, melihat fakta yang terjadi pada sistem yang jauh dari syariah, Hizb mempunyai visi untuk memperbaiki bahkan mengubah struktur (sistem) sekuler yang ada dengan *khilafah*.

Dalam pembahasan penelitian, penulis akan membahas strategi Hizb dalam pandangan konstruktivisme dari segi metodologi, ontologi, dan empirisme. Penekanan terhadap ide dan gagasan yang akan membentuk sebuah konstruksi sosial (atau struktur sosial yang dalam hal ini sistem *khilafah*). Yang mana dalam kajian ini, penulis akan mengutamakan elemen agen dan struktur, serta bagaimana keterikatan tersebut akan menghasilkan sebuah struktur sosial yang baik. Agen (Hizb sebagai perwakilan rakyat) dalam membangun kembali sistem *khilafah islamiyah* dan struktur (sistem sekuler internasional) yang ingin diubah.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan diatas, maka yang menjadi *concern* utama bagi penulis adalah strategi apa yang digunakan Hizbut Tahrir dalam menginternasionalisasikan ide penegakan Khilafah Islamiyah. Menjawab pertanyaan tersebut menggunakan pandangan konstruktivis, penulis berasumsi bahwa objektivitas Hizb dalam menginternasionalisasikan ide penegakan kembali *khilafah islamiyah* di era saat ini yaitu *pertama*, meningkatkan kapasitas Hizbut Tahrir sebagai organisasi Islam dan aktor Hubungan Internasional dan *kedua*, meningkatkan tingkat relevansi gagasan khilafah Islamiyah pada skala internasional.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian dengan data hasil penelitian berupa gambaran atau bersifat deskriptif yaitu berupa hasil ucapan, tulisan dan perilaku individu atau kelompok yang dapat diamati berdasarkan subjek itu sendiri. Maka dari itu, melakukan wawancara terbuka dan observasi data merupakan upaya penting yang harus dilakukan untuk memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau kelompok.

Ada beberapa tahapan, antara lain:

A. Tahap Perencanaan

Melalui tahap ini, penulis akan memulai dari memformulasikan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Juga menyertakan perencanaan strategi umum untuk mempermudah penulis dalam memperoleh dan menganalisa data dari sebuah penelitian. Tahapan ini harus dimulai dari memberikan titik fokus pada konsep dan hipotesis yang mengarahkan penulis untuk tetap pada koridor termasuk dengan mengumpulkan dan menelaah literatur dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yang berhubungan dengan judul dan permasalahan penelitian ini. Bisa dikatakan tahapan ini dengan "Term of references".

B. Tahap Pengkajian secara teliti (terhadap Rencana Penelitian)

Langkah ini merupakan pengembangan dari tahap perencanaan. Diawali dengan membuat deskripsi umum latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis, prosedur analisis dan pengumpulan data. Ini dilakukan agar dapat mencapai tujuan pokok penelitian yang dengan ini disebut dengan usulan proyek penelitian.

C. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap ini penulis akan menjabarkan alur dan upaya pengumpulan data untuk mendukung penelitian ini.

a. Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang menjadi target penelitian atau unit analisisnya adalah partai politik Hizbut Tahrir. Kelompok ini dianggap solid dan konsisten terhadap tujuannya yang mempunyai jaringan yang tersebar diberbagai wilayah baik skala nasional maupun internasional. Pengorganisasian kelompok ini dikenal sangat rapi dan strategis. Pendekatan masyarakat (*grassroot*) yang mereka aplikasikan membuat kelompok ini sangat baik dimata masyarakat dan mudah diterima diberbagai kalangan. Untuk mempermudah penelitian ini, pengambilan data dilakukan di Yogyakarta.

b. Sumber Data dan Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder yaitu dengan metode wawancara (*depth interview*) dengan para ahli yang berhubungan langsung dengan topik ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data original dan informasi yang lebih rinci dari tangan pertama mengenai ide-ide, konsep, proses perkembangan kelompok tersebut. Kemudian juga metode referensi pustaka yaitu dengan mencari sumber atau data resmi dari organisasi yang terkait serta data pendukung lainnya seperti internet dan elektronik data lainnya.

D. Analisis data

Data penelitian yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Maksudnya penulis akan menggambarkan jawaban dari pertanyaan yang diterangkan diatas yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan langsung (wawancara) dan tidak langsung (studi pustaka).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam meraih tegaknya khilafah Islamiyah, kelompok atau para pengemban dakwah mempunyai tugas yang sangat penting dan strategis. Yakni mengkaji secara cermat dan rinci apa yang terjadi di kalangan masyarakat sebagai jalan pembuka untuk mempengaruhi dan memperbaiki institusi pemerintahan. Dengan melakukan kajian-kajian seperti ini, pengemban dakwah mampu melakukan tata cara praktis dalam mereorganisasikan institusi yang terlibat di dalam administrasi pemerintahan. Sehingga, sistem Islam akan lebih mudah terwujud dalam menaungi negara.

Internasionalisasi adalah langkah fundamental dalam proses desain dan proses pengembangan (dalam hal ini ide Hizb ut-Tahrir). Ini berarti upaya dalam meningkatkan kapasitas lokal dan mengenalkan ide tersebut dalam skala lebih luas. Ide ini berawal dari pemikiran yang dihasilkan dari penggabungan sebuah fakta dan kondisi umat saat ini dengan sebuah informasi yang sudah ada sebelumnya sehingga menghasilkan sebuah pemikiran.

Dalam bab ini penulis akan mencoba mengkaji mengenai strategi politik Hizbut Tahrir dalam menginternasionalisasikan ide penegakan kembali Khilafah Islamiyah. Disini penulis mengkonsep ada dua strategi khusus yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir untuk mewujudkan misi tersebut, yaitu:

A. Meningkatkan Kapasitas Hizbut Tahrir Sebagai Organisasi Islam dan Aktor Hubungan Internasional

Hizbut Tahrir pertama kali didirikan di Yordania pada tahun 1953. Karena berkat perjuangan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dan teman-teman ulama yang tetap giat dalam menyebarkan Islam, perkembangan Hizb telah menjangkau hampir ke 50 negara dan tersebar ke seluruh dunia (mulai dari Timur Tengah, Eropa, Asia, Afrika, Amerika bahkan Australia). Pengembangan dan penyebaran seperti inilah yang dilakukan Hizb dalam meningkatkan kesadaran umat terhadap Islam. Kapasitas pada sebuah institusi dapat dimati dari segi kualitas dan kuantitasnya yakni berdasar pada nilai dan keanggotaannya.

Refleksi metode Rasulullah SAW

1. Fokus perbaikan individu dan rekrutmen Kader

a. Sembunyi-sembunyi (Rahasia)

Pada tahun 610 M, Muhammad SAW seorang al-Amin "dipercaya" diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketika ia sedang menetap di Gua Hira. Kemudian Malaikat Jibril datang membawa secarik kertas yang berisikan tulisan yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT tepat di bulan Ramadhan yakni Surat Al-Alaq [48]. Beberapa waktu kemudian, turun ayat berupa peringatan [49]. Sejak saat itulah Rasulullah, memulai dakwahnya dengan mengajak kerabat terdekatnya (istrinya Khadijah, sepupunya Ali bin Abi Thalib, budaknya Zaid bin Haritsah dan sahabat karibnya Abu Bakar) untuk beriman. Melalui keempat kerabat ini, Islam berkembang dan dikenalkan. Sehingga banyak yang memeluk agama Islam. Dengan banyaknya rakyat Makkah yang beriman, kemudian Rasulullah membentuk sebuah *kutlah* (kelompok kecil yang tangguh di atas asas Islam) yang disebut sebagai pembentukan *kutlah* sahabat. Lalu, Rasulullah menetapkan rumah Arqam sebagai tempat berkumpul dan bertemunya para sahabat atau disebut *halaqah* (lingkaran) dimana kegiatan dakwah berlangsung. Disinilah, Rasul membina tsaqafah para sahabat dan meneguhkan keimanannya. *Kutlah* tersebut beranggotakan 40 orang yang kebanyakan dari kalangan pemuda dan remaja. Bahkan setiap ayat Al-Qur'an yang turun, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menghafal dan menuliskannya pada pelepah

dan tulang-tulang binatang. Melalui halaqah inilah Islam semakin tersebar dan kebenaran Islam sampai ke telinga Umar bin Khattab, yang pada akhirnya ia beriman.

Pada tahun 613 M, kegiatan dakwah ini berkembang secara terang-terangan. Nabi menampakkan keberadaan kelompoknya di tengah masyarakat dengan membentuk dua barisan (Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab).

2. Berinteraksi dengan Umat

a. Terjadinya perang pemikiran

Keberanian Rasul menampakkan kelompoknya menyebabkan benturan pemikiran. Terjadilah, antara umat Muslim dan masyarakat Arab. Kaum Quraisy berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap kaum Muslim. Melalui pamannya Abu Thalib, kaum Quraisy mengancam umat Muslim untuk menghentikan dakwahnya. Tapi Rasul tetap teguh dengan keimanannya dan tidak akan menghentikan dakwahnya. Disinilah penyiksaan oleh kaum Quraisy terhadap umat Muslim terjadi. Untuk mengurangi penderitaan umat Muslim, Rasul memerintahkan umat untuk hijrah ke Abasiyah (sekarang Ethiopia) pada tahun 617 M. Disana terdapat raja Najasyi yang adil dan melarang perbuatan dzalim. Sahabat merasakan kesejahteraan di tempat ini.

Petinggi Quraisy mengirimkan dua orang suruhannya untuk memfitnah kaum Muslim yang tinggal di Abasiyah. Disini terjadilah perang pemikiran antara Amar bin Ash dengan Ja'far.

b. Membongkar Propaganda Negatif dan Pertarungan politik

Suruhan kaum Quraisy memfitnah Islam dihadapan raja Najasyi, namun Ja'far berhasil menjelaskan keadaan sebenarnya kepada beliau. Kemudian kaum Quraisy kalah dan kembali ke Makkah. Beralih kepada pemboikotan 612-620 M, tidak dibolehkannya menikah dan melakukan transaksi jual beli kepada Abdul Mutholib. Tetapi gerak dakwah Rasul dan sahabat tidak berkurang bahkan mereka semakin semangat untuk terus memperjuangkan Islam.

Tahun 621 M, dakwah Islam mengalir ke Yastrib (sekarang Madinah). Ada 12 orang Yastrib yang berjanji setia kepada Rasul sehingga disebutlah kondisi sebagai Baiat Aqabah I.

622 M-l H, Rasulullah hijrah ke Madinah dengan disambut rakyat yahudi Yastrib dengan meriah. Kemudian ia mendirikan negara Islam pertama yang diakui secara *de jure* dan *de facto*. Peradaban Islam muncul tanpa pertumpahan darah dan disarkan pada 3 pilar

1. Aqidah Islamiyah menjadi pondasi peradaban
2. Halal dan haram menjadi standar kehidupan
3. Keridhoan Allah SWT menjadi kebahagiaan yang dicari

Sejak saat itulah peradaban Islam dimulai. Rasul mendirikan masjid sebagai pusat dari segala kegiatan baik ibadah maupun sosial. Rasul juga menyatukan

persaudaraan kaum Muhajirin dan Anshor dalam Piagam Madinah.

3. Pengambilalihan Kekuasaan

Dakwah Islam keluar Madinah. Perlawanan pertama dilakukan kepada Kaum Quraisy di Makkah dengan melakukan ekspedisi militer. 623 M-2 H, Rasulullah mengirimkan ribuan pasukan Muslim di Perang Badar melawan kaum Yahudi. 3 H, perang Uhud. Diawal menang, tetapi pasukan panah melanggar strategi untuk tetap di tempatnya membuat pasukan menjadi goyah.

628 M, diadakannya perjanjian Hudaibiyah (kaum Quraisy dan Islam) 10 tahun untuk tidak menyerang dan masuk ke area masing-masing. Tapi kaum Quraisy melanggar dan berkhianat dan kaum Muslim diserang. Banyak yang meninggal dalam kejadian ini. 8 H, penaklukan Kota Makkah. Rasulullah mengajak negara kafur untuk ikut dalam pemerintahan Islam (pemimpin romawi, vatikan dan negara kafir lainnya). 9 H perang thaif. Romawi menyerang daulah islamiyah karena merasa tidak ingin dikuasai oleh Islam. Tetapi saat penyerangan, pasukan romawi kalah strategi dan menerima kekalahan. Akhirnya romawi kalah dan menyerah.

B. Meningkatkan Tingkat Relevansi Gagasan Khilafah Islamiyah pada Skala Internasional

Penulis melihat, sejak dahulu hingga saat ini kebutuhan masyarakat umum yaitu sejahtera dan bahagia. Inilah yang akan mengukur tingkat relevansi *Khilafah* yang dapat mensejahterakan kehidupan saat ini.

Penilaian relevansi bertujuan untuk menilai sebuah fenomena atau kebutuhan masyarakat saat ini dengan sistem yang mengatur di dalamnya. Charles Taylor dalam bukunya "*Modern Social Imaginaries*" mengatakan dunia sedang membuat visi perbaikan yang lebih bermoral atau normatif. Ini merupakan dampak dari kondisi domestik dan internasional yang berantakan akibat perang agama. Ditandai dengan teori Hukum Alam yang muncul. Charles mengutip pernyataan Grotius dalam bukunya bahwa kehidupan yang beraturan (normatif) mendasari politik sosial dari alamiah anggota masyarakatnya. Ia menjelaskan karakter dasar manusia bersifat rasional, agen yang mampu bersosialisasi dan berkolaborasi dalam menciptakan perdamaian serta kebaikan bersama. Ide yang bermoral menitikberatkan pada hak dan kewajiban individu terhadap orang lain.

Hizbut Tahrir adalah partai politik non parlemen yang sangat dekat dengan masyarakat. Bicara konstruksi sosial, perubahan pemikiran dan pola sikap dimulai atau dipengaruhi oleh ide yang muncul di kalangan masyarakat. Masyarakat adalah salah satu objek seruan Allah yang diterapkan oleh Hizb dalam menjalankan strategi pendirian khilafah. Hal inilah yang menjadikan Hizb unik dengan partai politik lain atau jamaah lain.

Pemikiran Hizb dapat dikatakan memiliki keunikan tersendiri. Hal ini dikarenakan upaya relevansi pergerakan Hizb untuk menyuarakan khilafah ke tengah

umat dan menjadikannya sistem peradaban dunia. Keunikan tersebut dapat dilihat dari segi kompleksitas dalam menerapkan sistem Islam di skala internasional. Ini bisa diamati dari logika berpikir Hizb dalam menganalisa kondisi masyarakat dan pendekatannya yang sangat halus.

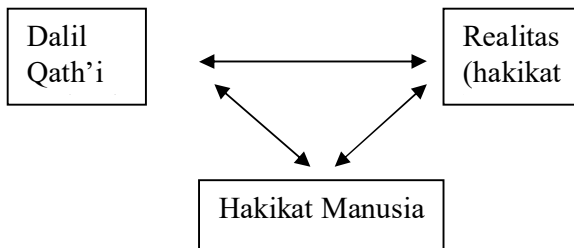
1. Pemikiran Hizbut Tahrir

Ada beberapa hal yang dapat penulis analisa dari pemikiran Hizb, yakni pemikiran yang kompleks dan detail, kekokohan berpikir, dan logika yang memuaskan akal serta menentramkan hati.

a. Pemikiran yang kompleks

Maksudnya, Hizb memiliki pemikiran yang saling berkaitan antara satu aspek dengan yang lain. Misalnya, istilah *khilafah* dan ketetapan yang *qath'i* (pasti) adanya khilafah kembali di dunia sejak runtuhnya sistem pemerintahan Islam pada tahun 1924. Hizb tidak semata-mata mengambil istilah *khilafah* dari dalil yang didapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, tetapi keberadaan *khilafah* akan terwujud tanpa adanya kelompok yang mewujudkannya. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok dakwah yang menyerukan kepada *ma'ruf* (baik) dan mencegah kepada yang *munkar* (buruk).

Di dalam hadits riwayat akan ada 73 golongan dan hanya satu di antara golongan tersebut yang akan memasuki surganya Allah SWT. Thabrani dan Ahmad yang intinya tentang kewajiban adanya kelompok, kelompok yang dimaksud tergolong ke dalam *ahlussunah wal jamaah* [51]. Sebuah kelompok dapat dibentuk dari sekumpulan individu yang memiliki pemahaman bersama dan ingin mewujudkan tujuannya. Individu adalah manusia yang hidup dari lingkungan masyarakat.



Figur Logika berpikir Hizbut Tahrir

Figur diatas memperlihatkan keterkaitan antara keberadaan dalil yang pasti dengan kondisi masyarakat yang tampak pada fenomena saat ini. Keterikatan inilah menggambarkan pemikiran Hizb yang detail dan tidak berdasarkan dari pemikiran kelompok. Tetapi ide Hizb muncul ketika melihat fenomena masyarakat, bagaimana cara mengetahui masyarakat, apa saja yang terlibat di dalam kemasyarakatan tersebut, bagaimana cara berpikir masyarakat, dan bagaimana cara memperbaiki bahkan merubah pemikiran masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum syarak.

b. Pemikiran yang Kokoh

Hizb sudah tersebar ke 50 negara (yang termasuk di dalamnya Asia, Eropa, Afrika, Amerika dan Australia). Walaupun dalam kondisi negara dan masyarakat yang berbeda, dari sejak berdiri hingga saat ini Hizb memiliki pemikiran dan metode yang sama dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Bisa ditemui dari setiap negara yang didiami oleh Hizb menerapkan hal yang sama tetapi yang membedakan *uslub* (cara) berbeda dengan menyesuaikan kondisi internal negara. Sehingga, inilah yang membuat Hizb dapat berkembang dan bertahan di dalam negara tersebut. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi Hizb dalam dakwahnya. Seperti di Asia Tengah, walaupun di negara-negara Asia Tengah penentangan dari pemerintah terjadi pada Hizb, Hizb tetap menjalani dakwahnya di tengah masyarakat.

c. *Memuaskan Akal dan Menentramkan Hati*

Pemikiran Hizb tidak berlandas pada kepentingan pribadi maupun kelompok. Tapi, dasar yang diambil yakni Al-Qur'an dan Hadits yang di dalamnya terdapat penjelasan perihal kehidupan yang sangat logis dan dapat memuaskan akal.

2. *Politik Luar Negeri Da'wah Khilafah Islamiyah*

Penyebarluasan akidah Islam merupakan landasan bagi umat Islam dalam menentukan kebijakan ketika berinteraksi dengan bangsa lain di seluruh dunia. *Dakwah* dan *jihad* diyakini adalah metode yang ditunjukkan negara Islam di mata dunia. Dunia internasional saat ini sangat dekat dengan istilah *jihad*. Islam seringkali dikaitkan dengan konsep ini. Yang pertama dilakukan yakni pembersihan dan penjelasan makna *jihad* yang sebenarnya dan mengubah stigma masyarakat internasional mengenai makna *jihad* itu sendiri. Era globalisasi saat ini, yang menciptakan kondisi tanpa batas. Hal inilah yang membuat umat Muslim harus memutar otak karena sudah pasti segala bentuk hambatan dan rintangan fisik akan menghantui peradaban Islam. Dengan *jihad* inilah, Muslim berjuang untuk menghancurkan dan menghilangkan segala tantangan global yang ada. Maksudnya, siaga militer dalam kondisi global saat ini menjadi sebuah keharusan dan itu juga dimiliki Islam sejak dulu. Juga memiliki pengaturan yang sangat baik di zaman Rasul. Ini yang diterapkan umat Muslim saat ini dan memperjuangkannya hingga tegaknya khilafah Islamiyah.

Seruan dakwah juga mendorong negara Islam untuk melakukan aktivitas regional maupun internasional. Di era Rasulullah SAW, aktivitas *jihad* dilakukan kepada kaum kafir yang tidak membangkang dari ajaran Islam dan Rasul menyeru kepada mereka untuk memberikan *jizyah* (pembayaran bagi non Muslim). Jika tidak, maka Rasul akan memeranginya. Tapi keadaan Islam saat ini sudah terpecah belah dan pemikirannya sudah dipengaruhi dengan pemikiran Barat. Hampir semua sektor yang ada di era global dikuasai Barat baik politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan sosial. dengan proses *jihad* ini, Islam mampu bertahan dan menjalankan dakwah (menyebarkan nilai Islam) ke seluruh dunia.

Tetapi, daulah khilafah Islamiyah memiliki struktur pemerintahan yang sangat detail dan segala sektor yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat dunia sudah diatur secara lengkap di dalam Al-Qur'an. Di dalam kehidupan politik, Islam memiliki konsep *riayah siulil umah* yang artinya mengurus urusan umat dan ini berkaitan dengan kehidupan bernegara. Masyarakat menjadi poin penting dalam sebuah negara. Pendidikan, Islam mengatur pengajaran yang adil dan membebaskan segala pembiayaan karena termasuk mensejahterakan umat. Ekonomi, pengaturan anggaran diurus oleh *baitul maal* yang ini didapat dari pajak kepemilikan pribadi dan hasil sumber daya alam. Di hukum, Islam memiliki ketegasan bertindak dan mengedepankan tsaqafah Islam di pendidikan untuk mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Inilah, yang disebut kebebasan dalam hidup. Masyarakat bisa tinggal di udara yang bebas di dalam lingkup sistem Islam yang kuat dan adil.

IV. KESIMPULAN

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan Hizb dalam upaya menginternasionalkan ide penegakan kembali *khilafah Islamiyah* mengupayakan pendekatan sosial yakni meningkatkan kapasitas Hizb dengan cara: pembinaan dan kaderisasi; berinteraksi dengan umat; pengambilalihan kekuasaan. Kemudian Hizb melakukan peningkatan relevansi ide Khilafah dengan kehidupan internasional saat ini. Yakni dengan memasukkan pemikiran Hizb secara perlahan ke dalam *mindset* masyarakat internasional; dan menjalankan aktivitas *jihad* sebagai politik luar negeri negara Islam dalam melancarkan dakwahnya. Jadi, dakwah dan *jihad* menjadi tolak ukur utama menyebarkan Islam ke seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abul A'la Al-Maududi, 1996, *Khilafah Dan Kerajaan*, Penerbit Mizan, Bandung. hal 111-129.
- [2] Abdurrahman Muhammad Khalid, Soal Jawab Seputar Gerakan Islam, Pustaka Thoriqul Izzah, Jakarta.
- [3] Anonim, 2014, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, HTI Press, Jakarta.
- [4] Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* dipublikasi oleh Cambridge University Press (virtual publishing) for and on behalf of the press syndicate of the University of Cambridge, the pitt building, trumpington street, cambridge cb2 1rp 40 west 20th street, new york, ny 10011-4211, usa 477 williams town road, port melbourne, vic 3207, australia diambil dari <https://www.passeidireto.com/arquivo/5758687/alexander-wendt---social-theory-of-international-politics>
- [5] Charles Taylor, 2005, *Modern Social Imaginaries*, Duke University Press, United States. Hal 3

- [6] Hizbut Tahrir, 2005, Struktur Negara Khilafah (Pemerintah Dan Administrasi), HTI Press, Jakarta. hal 29
- [7] Muslim Mufti, M.Si, Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran, CV. Pustaka Setia, Bandung. Hal 166.
- [8] Sidik Jatmika, 2013, Hubungan Internasional Kawasan Timur Tengah, Yogyakarta. hal 59-63
- [9] Redaksi Portal HI, *Konstruktivisme dalam Kajian HI*, 2012, diambil dari <http://www.portal-hi.net/konstruktivisme-dalam-kajian-hi/> diakses pada 9 April 2016 pukul 13.30
- [10] Siti Muslikhati, S.IP., M.Si, Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Pemerintahan Dunia, 2003, Yogyakarta. Hal 45
- [11] Taqiyuddin An-Nabhani, 2001, Pembentukan Partai Politik Islam (Edisi Mu'tamadah), cetakan ke-4 penerjemah Taufiq Muhammad Asy-Syawi, 1997, Syuro Bukan Demokrasi, Gema Insani Press, Jakarta. hal 21
- [12] Vinandika, Teori Hubungan Internasional: Konstruktivisme diambil dari Wendt, Alexander. 1999. *Social theory of international politics*. Cambridge: Cambridge University Press
- [13] Wahyu Wibisana, 2011, khilafah Sebagai Sistem Politik: Peluang dan Tantangannya, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Volume 9 Nomor 2*. Hal 137-143
- [14] Wahyu Wibisana, 2011, Khilafah Sebagai Sistem Politik, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.9 No.2*
- [15] Zufadli, Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir Di Yogyakarta, tesis magister studi politik dan pemerintahan dalam Islam, diujikan juli 2010, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- [16] Ahmad MS, *Runtuhnya Sekulerisme dan Tanda Kebangkitan Islam*, diambil dari <http://khilafatulmuslimin.com/runtuhnya-sekularisme-dan-tanda-kebangkitan-islam/>, 2014, pada 10 Februari 2015 jam 8.44. Diambil dari *Perjanjian Westphalia-Titik Balik Eropa*, Drs. Budiono, M.A, Kamus Bahasa Indonesia Baku, ALUMNI Surabaya, Surabaya.
- [17] Laura Christina Luzar, Teori Konstruksi Sosial, diambil dari <http://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>
- [18] Richard Ishida, W3C, Susan K. Miller, Boeing, Localization vs Internationalization, diambil dari (<https://www.w3.org/International/questions/qa-i18n>, tanggal 12/Mei/2005)
- [19] <http://wol.jw.org/en/wol/d/r25/lp-in/2004205#h=6>
- [20] Anonim, Dalam Sejarah Ini Dia Faktor Munculnya Gerakan Islam Modern, diambil dari <https://www.islampos.com/dalam-sejarah-ini-dia-faktor-munculnya-gerakan-islam-modern-1-142652/>
- [21] Anonim, Pembaharuan dalam Islam, diambil dari <http://belajar.dedeyahya.web.id/2011/10/pembaharuan-dalam-islam-dan-tokohnya.html>
- [22] Anonim, Kebijakan AS dan Tatanan Dunia Baru, diambil dari http://indonesia.rbth.com/politics/2014/10/30/putin_serukan_pembentukan_tatanan_dunia_baru_2573
- [23] Q. S An-Nuur ayat 55 mengenai kekuasaan yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang taat dan mengerjakan amal shaleh.
- [24] hadits riwayat Ahmad dan al-Bazzar, Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah-Pemerintahan dan Administrasi Negara Khilafah, HTI Press, Jakarta Selatan hal 10.
- [25] (Zakaria, Labib,dkk), Hti Press, Bogor.
- [26] Q.S Al-Alaq ayat 1-5 yang bersisi tentang "membaca"
- [27] Q.S Al-Mudatsir
- [28] Ahlussunnah wal jamaah, menurut tafsir yang disampaikan oleh Ustadz Felix mengenai kewajiban membentuk kelompok yakni golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para shohabat terdahulu (berdasarkan wahyu Allah SWT) dan tergabung ke dalam sebuah kelompok yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasarnya.